

Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru

Redyanto Sidi

:Universitas Pembangunan Panca Budi
e-mail: redysidi@gmail.com

Abstrak

Peningkatan pemahaman hukum kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi profesional medis, mengingat kompleksitas dan dinamika dunia kesehatan yang melibatkan berbagai aspek hukum. Profesional medis, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekanbaru, perlu memahami regulasi yang mengatur praktik kedokteran dan hak serta kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum kesehatan melalui forum diskusi interaktif yang melibatkan dokter dan tenaga medis lainnya di Pekanbaru. Forum diskusi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia, dengan mengedepankan materi yang relevan dan aplikatif. Peserta diskusi diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung kepada narasumber yang ahli di bidang hukum kesehatan. Diskusi ini juga berfokus pada isu-isu aktual dalam dunia medis, seperti hak pasien, etika kedokteran, serta regulasi terkait tanggung jawab medis dan kewajiban profesional medis dalam menghadapi tuntutan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan interaktif, di mana peserta tidak hanya mendengarkan paparan materi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi yang membahas kasus-kasus nyata yang sering dihadapi dalam praktik kedokteran. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik, meningkatkan rasa tanggung jawab para profesional medis, serta memperkaya wawasan mereka dalam menghadapi berbagai situasi hukum yang mungkin timbul dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui forum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis di Pekanbaru, serta memperkuat kesadaran mereka terhadap pentingnya hukum dalam setiap aspek praktik kedokteran. Pada akhirnya, program ini dapat berkontribusi pada terciptanya sistem kesehatan yang lebih transparan, adil, dan profesional di Indonesia, khususnya di Pekanbaru..

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Profesional Medis, Diskusi Interaktif



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, peran para profesional medis sangat vital, baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas maupun dalam menjaga etika dan hukum kesehatan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi oleh profesional medis dalam memahami dan menjalankan hukum kesehatan sering kali terjadi. Banyak dari mereka yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pemahaman hukum kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum kesehatan di kalangan tenaga medis menjadi sangat penting untuk menciptakan praktik kedokteran yang tidak hanya bermutu tetapi juga mematuhi aturan hukum yang berlaku. Forum diskusi menjadi salah satu metode efektif untuk meningkatkan pemahaman para profesional medis mengenai berbagai aspek hukum kesehatan. Diskusi dalam forum ini dapat membahas berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam praktik medis, seperti malpraktik, hak pasien, kewajiban dokter, dan peraturan yang mengatur profesi medis. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif tentang pentingnya aspek hukum dalam menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan kesehatan. Diskusi yang mendalam dan berbasis pada pengalaman nyata akan memudahkan peserta untuk memahami bagaimana mengimplementasikan hukum kesehatan dalam praktik sehari-hari mereka.

Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki populasi medis yang cukup besar dan beragam. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekanbaru, sebagai organisasi yang menaungi para tenaga medis di daerah ini, berperan penting dalam meningkatkan kualitas profesionalisme anggotanya. Melalui forum diskusi ini, IDI Pekanbaru dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum kesehatan bagi anggotanya. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan antara sesama profesional medis mengenai penerapan hukum kesehatan yang tepat dalam konteks lokal. Peningkatan kesadaran hukum kesehatan tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum bagi tenaga medis itu sendiri, tetapi juga terhadap hak-hak pasien. Dengan memahami betul hak dan kewajiban mereka, para tenaga medis dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menyikapi situasi yang melibatkan aspek hukum. Kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur yang diatur oleh hukum dapat berakibat fatal, baik untuk pasien maupun untuk profesional medis yang bersangkutan. Oleh karena itu, upaya untuk menanamkan kesadaran akan hukum kesehatan ini sangat diperlukan agar dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pasien dan tenaga medis.

Di samping itu, meningkatnya kasus malpraktik dan ketidaktahuan sebagian besar tenaga medis terhadap hukum kesehatan yang berlaku memperparah situasi ini. Ketidakpahaman terhadap peraturan hukum dapat memunculkan risiko hukum yang besar, bahkan dapat merusak citra profesi medis secara keseluruhan. Forum diskusi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai peraturan hukum



yang mengatur praktik medis, serta memberikan solusi bagi para profesional medis agar terhindar dari potensi risiko hukum. Sebagai contoh, topik tentang malpraktik medis dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh tenaga medis akan menjadi bahasan penting dalam forum ini.

Selain itu, forum ini juga berfungsi untuk memperkenalkan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi profesi terkait, sehingga para profesional medis selalu terupdate dengan perubahan hukum yang mempengaruhi bidang kesehatan. Melalui forum ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan pemahaman yang dapat diterapkan langsung dalam praktik sehari-hari, serta menumbuhkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap kode etik medis. Para peserta dapat belajar langsung dari para ahli hukum kesehatan, pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus medis, serta pembicara yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika hukum kesehatan di Indonesia. Sebagai langkah awal, penting bagi IDI Pekanbaru untuk secara rutin mengadakan forum diskusi dengan melibatkan berbagai elemen terkait, seperti akademisi, pengacara, serta praktisi medis. Dengan demikian, kesadaran hukum kesehatan dapat berkembang secara sistematis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme tenaga medis di Pekanbaru. Melalui forum ini, diharapkan tercipta lingkungan medis yang lebih bertanggung jawab, lebih transparan, dan lebih mematuhi hukum, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Metode

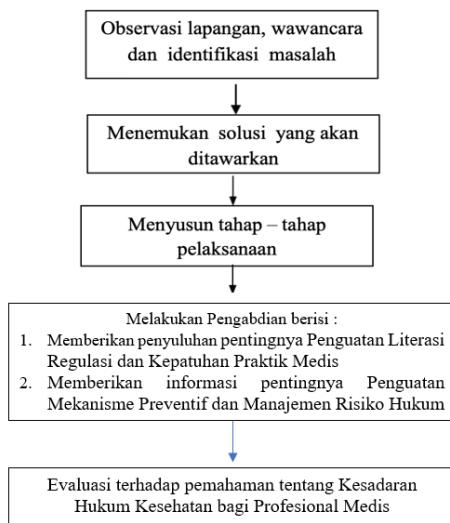
A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian peningkatan kesadaran hukum kesehatan bagi profesional medis melalui forum diskusi di IDI Pekanbaru ini mengadopsi pendekatan partisipatif dan interaktif. Forum diskusi akan melibatkan para profesional medis sebagai peserta aktif, di mana mereka diajak untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai tantangan serta permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik medis. Selain itu, akan ada pemaparan materi dari ahli hukum kesehatan, serta sesi tanya jawab yang memungkinkan para peserta untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum yang relevan dengan profesi medis. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai penerapan hukum kesehatan dalam praktik sehari-hari, sehingga para tenaga medis dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka dalam memberikan pelayanan kepada pasien.



B. Prosedur Kerja

Adapun langkah – langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pengabdian di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekanbaru seperti terlihat pada Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Langkah – langkah Pengabdian masyarakat

C. Observasi lapangan

Metode lapangan dalam pengabdian Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru dilakukan secara partisipatif dan sistematis dengan mengamati langsung dinamika diskusi, tingkat pemahaman peserta, serta respons profesional medis terhadap isu-isu hukum kesehatan yang dibahas. Tim pelaksana melakukan pencatatan terstruktur terhadap pola interaksi, jenis pertanyaan yang muncul, kasus hukum yang sering menjadi perhatian, serta bentuk miskonsepsi yang masih ditemukan dalam praktik klinis. Observasi ini dilaksanakan selama forum berlangsung di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru, dengan fokus pada bagaimana peserta menginternalisasi prinsip-prinsip regulasi kesehatan, etika profesi, dan manajemen risiko hukum dalam pelayanan medis. Data hasil observasi kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan, sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi strategis guna memperkuat budaya kepatuhan hukum dan profesionalisme tenaga medis di tingkat daerah.

D. Menemukan Solusi Permasalahan Paling Urgensi

Upaya menemukan solusi atas permasalahan paling urgensi dalam peningkatan kesadaran hukum kesehatan bagi profesional medis melalui forum diskusi di IDI Pekanbaru dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu akar persoalan yang



dominan, seperti rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum pelayanan medis, kurang optimalnya dokumentasi klinis, serta lemahnya komunikasi terapeutik yang berpotensi memicu sengketa. Melalui forum yang difasilitasi oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru, peserta diajak mendiskusikan kasus nyata, berbagi pengalaman praktik, dan merumuskan langkah preventif berbasis regulasi serta etika profesi. Pendekatan dialogis ini memungkinkan terbangunnya kesadaran kolektif bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan profesional dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Hasil diskusi kemudian diformulasikan menjadi rekomendasi praktis berupa penguatan edukasi hukum berkelanjutan, penyusunan pedoman internal berbasis manajemen risiko, serta peningkatan koordinasi antara organisasi profesi dan institusi layanan kesehatan guna menciptakan praktik medis yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien.

E. Menyusun tahapan pelaksanaan

Pada tahapan ini penulis menyusun langkah - langkah yang akan dilakukan pada saat pengabdian termasuk di dalamnya membuat jadwal kegiatan.

F. Melakukan kegiatan pengabdian berisi penyuluhan beberapa kegiatan yang harus dilakukan saat sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru, dan berikut poin penting yang harus dilakukan :

1) Pemahaman Komprehensif Regulasi Kesehatan

Profesional medis perlu memahami secara menyeluruh kerangka hukum yang mengatur praktik kedokteran, termasuk hak dan kewajiban dokter, standar pelayanan medis, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Literasi regulasi menjadi fondasi utama dalam membangun praktik yang taat hukum.

2) Penguatan Implementasi Informed Consent

Forum diskusi menekankan pentingnya persetujuan tindakan medis yang sah, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Pemahaman substansi *informed consent* berperan dalam melindungi hak pasien sekaligus mengurangi potensi sengketa hukum.

3) Optimalisasi Rekam Medis sebagai Instrumen Legal

Rekam medis bukan hanya dokumen administratif, tetapi alat bukti hukum yang krusial. Profesional medis perlu meningkatkan ketelitian, kelengkapan, dan akurasi pencatatan untuk memastikan akuntabilitas pelayanan.

4) Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko Hukum

Diskusi diarahkan pada identifikasi potensi konflik hukum dalam praktik klinis, strategi mitigasi risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential practice*) dalam setiap tindakan medis.

5) Penguatan Etika Profesi dan Profesionalisme

Kesadaran hukum tidak terlepas dari integritas dan etika profesi. Peran organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru menjadi penting



dalam pembinaan, pengawasan, dan advokasi anggota agar praktik medis selaras dengan standar etika dan hukum.

6) Penciptaan Budaya Diskusi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Forum diskusi berfungsi sebagai ruang reflektif untuk berbagi pengalaman, membahas studi kasus aktual, serta memperbarui pemahaman terhadap dinamika regulasi kesehatan. Pendekatan ini mendorong terbentuknya budaya sadar hukum yang berkelanjutan di kalangan profesional medis.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Pengabdian Kepada masyarakat antara lain:

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat bertajuk Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dr. Redyanto Sidi, SH. MH selaku Pemateri kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum yang mengatur praktik pelayanan kesehatan. Forum yang diselenggarakan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru ini diikuti oleh dokter umum dan dokter spesialis dengan latar belakang institusi yang beragam, sehingga diskusi berkembang secara dinamis dan kontekstual. Partisipasi aktif peserta terlihat dari intensitas pertanyaan serta keterlibatan dalam pembahasan studi kasus. Pada tahap awal kegiatan, ditemukan bahwa sebagian peserta masih memandang aspek hukum kesehatan sebagai ranah yang bersifat administratif semata, bukan sebagai bagian integral dari praktik profesional. Hasil pre-discussion assessment memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai batas tanggung jawab hukum, mekanisme penyelesaian sengketa medis, serta implikasi dokumentasi klinis terhadap proses pembuktian hukum. Temuan ini memperkuat urgensi pelaksanaan forum diskusi sebagai sarana edukatif dan reflektif. Dalam proses diskusi, pendekatan studi kasus terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis peserta. Kasus-kasus yang diangkat, baik yang bersifat hipotetik maupun aktual, memicu analisis kolektif terkait penerapan prinsip informed consent, standar prosedur operasional, dan kewajiban profesional. Peserta mulai memahami bahwa kelalaian administratif, seperti pencatatan rekam medis yang tidak lengkap, dapat berdampak pada konsekuensi hukum yang serius. Pembahasan juga menyoroti pentingnya komunikasi terapeutik sebagai strategi preventif dalam mengurangi potensi konflik hukum. Banyak permasalahan yang muncul bukan semata-mata akibat kesalahan tindakan medis, melainkan karena miskomunikasi antara dokter dan pasien. Forum ini menegaskan bahwa transparansi informasi, empati, dan dokumentasi komunikasi merupakan bagian dari perlindungan hukum yang tidak terpisahkan dari praktik klinis.

Selain itu, kegiatan ini menghasilkan peningkatan kesadaran mengenai manajemen risiko hukum dalam pelayanan kesehatan. Peserta mulai mengidentifikasi titik-titik rawan dalam prosedur pelayanan, termasuk pengambilan keputusan klinis pada kasus berisiko tinggi. Diskusi memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential practice*) perlu diintegrasikan



secara sistematis dalam setiap tahapan pelayanan medis. Dari sisi kelembagaan, forum diskusi mendorong penguatan peran organisasi profesi sebagai mediator dan pembina dalam isu-isu hukum kesehatan. Kolaborasi antara pengurus cabang dan anggota membuka ruang konsultasi yang lebih terstruktur terkait permasalahan hukum yang dihadapi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolektif melalui organisasi profesi efektif dalam membangun budaya sadar hukum. Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan adanya perubahan persepsi peserta terhadap urgensi literasi hukum kesehatan. Peserta tidak lagi melihat regulasi sebagai beban normatif, melainkan sebagai instrumen perlindungan profesional dan peningkatan mutu layanan. Transformasi ini tercermin dalam komitmen untuk memperbaiki tata kelola dokumentasi serta meningkatkan komunikasi dengan pasien.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga merekomendasikan perlunya institusionalisasi forum diskusi hukum kesehatan sebagai agenda rutin yang terintegrasi dengan program pengembangan profesional berkelanjutan (continuing professional development). Dengan menjadikan isu hukum sebagai bagian dari pembelajaran periodik di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru, proses peningkatan kesadaran tidak berhenti pada satu kali intervensi, melainkan berkembang menjadi mekanisme pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan standar praktik yang lebih seragam, memperkuat solidaritas profesi dalam menghadapi persoalan hukum, serta membangun budaya pelayanan kesehatan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun pasien.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan ini menegaskan bahwa forum diskusi merupakan metode yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan di kalangan profesional medis. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan sikap dan komitmen praktik yang lebih akuntabel. Dengan keberlanjutan program dan pendampingan berkala, diharapkan terbentuk ekosistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepatuhan hukum, etika profesi, dan perlindungan hak pasien secara berimbang.



Gambar 1. Pemateri memberikan materi di kegiatan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Hasil pengabdian menghasilkan :

Berikut tujuh poin penting hasil pengabdian terkait dengan *Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru*:

1. Peningkatan Literasi Hukum Kesehatan

Kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi praktik kedokteran, tanggung jawab profesional, serta konsekuensi hukum dalam pelayanan medis. Peserta lebih mampu mengidentifikasi batas kewenangan dan kewajiban hukum dalam tindakan klinis.

2. Perubahan Persepsi terhadap Aspek Hukum

Hasil diskusi mengindikasikan pergeseran paradigma dari memandang hukum sebagai ancaman menjadi instrumen perlindungan profesional. Kesadaran ini memperkuat motivasi untuk menjalankan praktik yang lebih tertib dan sesuai standar.

3. Peningkatan Kualitas Dokumentasi Medis

Peserta menyadari pentingnya rekam medis yang lengkap, sistematis, dan akurat sebagai alat bukti hukum. Komitmen untuk memperbaiki tata kelola dokumentasi menjadi salah satu hasil konkret kegiatan.

4. Penguatan Implementasi Informed Consent

Forum diskusi mendorong pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur persetujuan tindakan medis yang sah secara hukum dan etis, sehingga memperkecil potensi sengketa antara tenaga medis dan pasien.

5. Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko Hukum

Profesional medis mampu mengidentifikasi potensi konflik hukum dalam praktik pelayanan dan merumuskan langkah-langkah preventif berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential practice*).

6. Penguatan Peran Organisasi Profesi

Kegiatan mempertegas fungsi pembinaan dan advokasi oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai wadah konsultasi dan penguatan kapasitas hukum bagi anggotanya.

7. Terbangunnya Budaya Diskusi dan Refleksi Profesional

Forum menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman, membahas studi kasus aktual, serta memperbarui pemahaman terhadap dinamika hukum kesehatan. Hal ini menciptakan fondasi budaya sadar hukum yang berkelanjutan dalam komunitas profesional medis.

Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan audiensi bersama pemateri terkait dengan materi yang diberikan tentang *Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Gambar 2. Pemateri melakukan tanya jawab dengan peserta

Pengabdian masyarakat mengenai peningkatan kesadaran hukum kesehatan bagi profesional medis melalui forum diskusi di IDI Pekanbaru dirancang sebagai ruang dialog akademik dan praktis yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelayanan klinis. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan pemahaman dokter terhadap tanggung jawab hukum, standar profesi, serta dinamika regulasi kesehatan yang terus berkembang. Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga terlibat aktif dalam analisis kasus dan refleksi pengalaman praktik. Forum yang difasilitasi bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum yang kontekstual mampu meningkatkan sensitivitas profesional terhadap aspek legal dalam setiap pengambilan keputusan medis.



Gambar 3. Pemateri Foto Bersama dengan para Peserta IDI Pekanbaru



Kegiatan ini di padukan dengan pelantikan pengurus IDI Cabang Pekanbaru dengan masa bakti 2023-2026 serta Lebih jauh, kegiatan ini menghasilkan penguatan komitmen kolektif untuk membangun praktik pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hukum. Diskusi yang berlangsung membuka kesadaran bahwa risiko sengketa medis sering kali berakar pada lemahnya komunikasi dan dokumentasi, bukan semata kesalahan tindakan klinis. Oleh karena itu, forum ini mendorong internalisasi prinsip kehati-hatian, transparansi informasi kepada pasien, serta konsistensi dalam pencatatan rekam medis. Secara keseluruhan, pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kognitif peserta, tetapi juga menumbuhkan budaya profesional yang lebih responsif terhadap tuntutan etika dan regulasi kesehatan di tingkat daerah.

B. Pembahasan

Setelah selesai dilakukan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru, para audiens mengajukan beberapa pertanyaan seperti :

1. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum dokter apabila telah menjalankan tindakan medis sesuai standar profesi tetapi tetap terjadi komplikasi pada pasien?
2. Sejauh mana kekuatan hukum rekam medis dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa antara dokter dan pasien?
3. Bagaimana implementasi *informed consent* yang ideal agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari?
4. Apa langkah preventif yang dapat dilakukan dokter untuk meminimalkan risiko tuntutan hukum dalam praktik pelayanan sehari-hari?
5. Bagaimana peran Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru dalam memberikan pendampingan atau advokasi ketika anggotanya menghadapi permasalahan hukum?
6. Dalam era digitalisasi layanan kesehatan, bagaimana aspek hukum terkait telemedicine dan perlindungan data pasien seharusnya diterapkan oleh tenaga medis?
7. Bagaimana strategi komunikasi efektif antara dokter dan pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik hukum?
8. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa medis di luar jalur pengadilan, dan kapan pendekatan mediasi lebih disarankan dibandingkan proses litigasi?
9. Apa implikasi hukum bagi dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan apabila terjadi kelalaian yang juga melibatkan manajemen institusi, dan bagaimana pembagian tanggung jawabnya secara proporsional?

C. Kesesuaian Program dengan Capaian Pembelajaran

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru memiliki kesesuaian yang kuat dengan capaian pembelajaran, khususnya dalam aspek penguatan kompetensi profesional.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

etika, dan tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dirancang untuk mendorong peserta tidak hanya memahami kerangka regulasi kesehatan secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan klinis yang akuntabel dan berbasis prinsip kehati-hatian. Melalui forum yang difasilitasi bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum, menyusun dokumentasi medis yang sesuai standar, serta menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif. Dengan demikian, program ini selaras dengan capaian pembelajaran yang menekankan integrasi pengetahuan, keterampilan profesional, dan sikap etis dalam mewujudkan praktik medis yang berkualitas dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun pasien.

Kesesuaian program ini juga tercermin dari pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah (*problem-based discussion*), di mana peserta diajak menganalisis kasus nyata yang relevan dengan praktik sehari-hari. Metode ini memperkuat capaian pembelajaran pada ranah keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis yang bertanggung jawab, serta kemampuan mengintegrasikan aspek hukum dalam standar pelayanan medis. Diskusi interaktif memungkinkan peserta menguji pemahaman normatif terhadap regulasi kesehatan sekaligus merefleksikan praktik yang telah dijalankan, sehingga terjadi proses pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Selain itu, program ini mendukung capaian pembelajaran pada dimensi sikap profesional dan komitmen etis. Melalui kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru, kegiatan ini memperkuat kesadaran kolektif bahwa kepatuhan terhadap hukum kesehatan merupakan bagian integral dari integritas profesi. Peserta didorong untuk membangun budaya disiplin dalam dokumentasi, transparansi informasi kepada pasien, serta konsistensi terhadap standar operasional prosedur. Dengan demikian, program tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter profesional yang berorientasi pada akuntabilitas dan perlindungan hukum dalam jangka panjang.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan bagi Profesional Medis melalui Forum Diskusi di IDI Pekanbaru dapat disimpulkan telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat literasi hukum tenaga medis di tingkat daerah. Forum diskusi yang diselenggarakan bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru berhasil menjadi ruang reflektif dan edukatif yang menjembatani pemahaman normatif regulasi kesehatan dengan praktik klinis sehari-hari. Peningkatan partisipasi aktif dan kualitas diskusi menunjukkan adanya kebutuhan yang relevan terhadap penguatan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Secara substansial, kegiatan ini mendorong perubahan paradigma profesional medis terhadap hukum kesehatan, dari yang sebelumnya dipersepsi sebagai beban administratif menjadi instrumen perlindungan dan penguatan



profesionalisme. Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya dokumentasi medis yang akurat, implementasi informed consent yang komprehensif, serta komunikasi terapeutik yang efektif sebagai bagian dari strategi pencegahan sengketa medis. Transformasi ini menjadi indikator bahwa forum diskusi mampu menghasilkan dampak kognitif sekaligus afektif.

Pada akhirnya, pengabdian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Keberlanjutan program melalui agenda diskusi rutin, pembinaan organisasi profesi, serta integrasi materi hukum dalam pengembangan profesional berkelanjutan menjadi rekomendasi strategis ke depan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta ekosistem pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel, etis, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi tenaga medis maupun pasien.

Daftar Pustaka

- Amir, A. (2019). *Hukum Kesehatan Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2018). *Teori dan Praktik Hukum Kesehatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Dewi, L. (2021). "Peran Forum Diskusi dalam Meningkatkan Kompetensi Hukum Profesional Medis." *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 17(1), 123-137.
- Harahap, M. (2017). *Hukum Kesehatan: Konsep dan Implementasi dalam Praktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, T. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rekam Medis.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, D. (2020). "Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan di Kalangan Profesional Medis melalui Pendidikan dan Pelatihan." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 12(2), 45-56.
- Sidi, R. (2018). Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(2), 115–130.
- Sidi, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter dalam perspektif hukum kesehatan nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 287–302.
- Sidi, R. (2020). Implementasi informed consent sebagai instrumen perlindungan hukum



- dalam pelayanan medis. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 6(1), 45–58.
- Sidi, R. (2021). Rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis: Analisis yuridis normatif. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 233–248.
- Sidi, R. (2022). Penguatan peran organisasi profesi dalam mitigasi risiko hukum tenaga medis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 789–804.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Yuliana, S. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Kesehatan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.